

BAB VI PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bab ini merupakan hasil akhir dan kesimpulan penelitian pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah: studi kasus pemilihan umum kepala daerah Kota Tangerang tahun 2018. Penelitian yang dilakukan ini melihat faktor penyebab munculnya calon tunggal di Pilkada Kota Tangerang, pada penelitian ini faktor penyebab kemunculan calon kandidat tunggal tidak semata hanya melihat dari segi partai politik saja tentunya. Namun, faktor penyebabnya juga terlihat dari segi keunikan yang mulai terbangun di Kota Tangerang, yaitu pertahanan kekuasaan yang tanpa sadar mulai dibentuk oleh petahana yang merupakan Walikota tangerang yang ingin maju kembali dalam dua periode. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan menjadi beberapa point yaitu :

Pertama, terciptanya calon tunggal di Pilkada Kota Tangerang ialah karena kegagalan partai politik yang ada di Kota Tangerang dalam proses kaderisasinya di partai politik, sehingga menyebabkan tidak munculnya kader potensial yang dapat maju dalam Pilkada tersebut. Namun, partai politik tanpa sadar tidak mengakui akan hal itu. Selain itu partai politik lebih memilih berkoalisi daripada berkompetisi karena memang tidak mau mengambil resiko akan kekalahan dalam pertarungan di Pilkada tahun 2018 artinya partai politik telah pragmatis. Kemudian anggaran yang cukup besar juga menjadi alasan kuat untuk tidak memunculkan kader dalam persiapan Pilkada dimana calon yang memiliki modal besarlah yang layak maju menjadikan politik transaksional. Pembentukan memborong partai ini melahirkan

calon tunggal tidak bisa terlepas dari kesepakatan politik yang terjadi antar partai politik dan orang kuat lokal. Dengan terdapatnya kontrak berupa pembelian kursi di DPRD Tangerang dengan imbalan bergabung dengan koalisi yang ada partai politik di Kota Tangerang ini mengindikasikan bahwa partai politik tersebut membutuhkan logistik serta amunisi untuk kebutuhan partainya dalam hal apaun.

Kedua, kemunculan calon tunggal pastinya akan menyebabkan kemunduran demokrasi jika terus-menerus terjadi. Politik transaksional yang begitu kuat mengakibatkan runtuhnya demokrasi dimana akhirnya akses di belakang para pemimpin tersebut dengan mudah memberikan kekuasaan bagi penyokong modal. Selain itu, kemunculan orang kuat lokal juga yang menjadikan lemahnya pengkaderan partai politik yang ada di Kota Tangerang dimana partai politik memiliki sejarah yang baik, namun karena terlalu kuatnya para pemilih modal menjadikan pertahanan kekuasaan terbentuk di Kota Tangerang. Kemudian dari fakta yang terlihat maka dikatakan demokrasi tidak berjalan dengan semestinya artinya demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan, karena pemilihan yang hanya satu calon saja tidaklah cukup kompetitif karena pada dasarnya bahwa hampir dari semua calon tunggal ini akan memenangi tanpa harus berusaha payah dalam berkampanye.

Ketiga, selain urusan formal partai politik faktor penyebab kemunculannya calon tunggal itu adanya politik informal, yaitu pertahanan kekuasaan yang jika dibiarkan berpotensi membangun dinasti politik yang ada di Kota Tangerang. Pertahanan kekuasaan yang mulai dibangun oleh Arif Rachdiono Wismansyah ini mendominasi urusan politik formalitas partai politik yang terbukti dengan tidak

adanya lawan dari partai politik lainnya. Akibatnya partai politik yang ada Kota Tangerang dengan mudahnya bergabung dengan pertahanan kekuasaan berkedok koalisi ini tidak terpecahkan dari logistik yang dimiliki Arif Wismansyah yang memang latar belakangnya sebagai pengusaha dan petahana di Kota Tangerang.

5.2 Saran

Peneliti menyadari apa yang telah dibahas dalam setiap bab dalam skripsi belum sepenuhnya menjawab pertanyaan terkait permasalahan faktor munculnya calon tunggal di Kota Tangerang tahun 2018 dimana Arief Rachdiono Wismansyah sebagai aktor politik yang memiliki kekuasaan di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan ruang lingkup penelitian yang cukup terbatas. Namun dalam penulisan skripsi ini peneliti mengajukan saran-saran yang kiranya dapat memperbaiki kualitas penyelenggaraan desentralisasi dan demokratisasi lokal di Indonesia :

1. Negara perlu mengatur agar biaya pemilu tidak mahal, sehingga peranan Lokal strongmen dalam penggunaan modal materil menjadi terbatas.
2. Kepemilikan harta kekayaan berlebih pada segelintir orang yang bersinggungan dengan kegiatan politik hendaknya ditelusuri secara ketat asal-usulnya oleh negara, untuk mengetahui apakah kekayaan yang dimiliki berasal dari sumber yang bisa diterima secara hukum. Sehingga dapat membatasi ruang gerak dari para aktor politik yang memiliki kekayaan dari hasil kegiatan-kegiatan politik yang merugikan masyarakat serta memanfaatkan modal finansial dalam berpolitik.
3. Untuk para partai politik sebaiknya tidak keluar dari ranah fungsi partai yang sudah ditetapkan dimana partai politik tetap mengedepankan ide gagasan serta merekrut kader sampai membentuk kader yang profesional dimana nantinya akan diorbitkan menjadi pemimpin negara, sehingga partai tidak lagi pragmatis ketika melihat calon kandidat yang memiliki modal logistik, finansial yang kuat menjadikan partai tidak mau bersaing serta bertujuan untuk mencari keuntungan semata.

4. Masyarakat diharapkan untuk sadar akan politik, bahwasanya pemahaman terkait hal tersebut untuk masyarakat sangat berpengaruh karena berkaitan dengan kepemimpinan yang akan berlangsung tingkat wilayah maupun pusat, jika masyarakat tidak sadar akan partisipasi politik maka menyebabkan para aktor politik yang berniat membangun kekuasaan akan leluasa dalam mempraktikkan kelicikannya.
5. Konsolidasi civil society untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan Kota Tangerang, agar tidak melahirkan raja-raja kecil dalam penyelenggaraan Pilkada diseluruh Indonesia di masa yang akan datang.

